

**EKSTENSI SIMBOLIK DOMINASI
PRAKTIK KOMUNIKASI POLITIK
(Reposisi Media dan Bingkai Kultural
Masyarakat Terhegemoni Kekuasaan)**

Oleh: Abdul Halik
Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E:mail: kacomandar@yahoo.co.id

Abstrak

Pendekatan klasik yang bersifat objektif mendominasi teori dan penelitian komunikasi politik. Namun, praktik komunikasi politik yang semakin dinamis, mendorong munculnya cara pandang lain yang lebih bersifat interpretif dan subjektif. Dalam prakteknya, aktivisme komunikasi politik berlangsung dalam konteks budaya yang beragam dan oleh karenanya dibutuhkan variasi simbol dalam menyampaikan pesan-pesan politik. Simbol-simbol komunikasi non-verbal kini dimanfaatkan para aktor politik tidak hanya sebagai pelengkap bagi komunikasi verbal, tetapi pilihan kode pesan yang sama pentingnya dalam proses komunikasi politik.

Media dimanfaatkan oleh kekuasaan politik dan ekonomi sebagai kekuatan hegemoni secara lembut dan ideologis. Media memposisikan diri dalam pengaruh dan dominasi lingkaran kekuasaan yang hegemonik sehingga ruang publik semakin sempit dan kehilangan daya.

Kata Kunci: Komunikasi non-verbal, bingkai kebudayaan, hegemoni, politik kontemporer.

Abstract

The objective classical approach dominates the theory and research of political communication. However, the increasingly dynamic practice of political communication encourages the emergence of other views which are more interpretive and subjective. In practice, political communication activities take place in cultural diverse contexts and therefore a variation of symbols in conveying political messages is required. The symbols of non-verbal communication are now used by political actors not only as a complement to verbal communication, but also as the message-code choices as important as the process of political communication.

The media is exploited gently and ideologically by political and economic power as a hegemonic power. Media put itself in the influence and dominance of a hegemonic power circle, so that the public space becomes narrower and less power.

Key words: Non-verbal communication, cultural framing, hegemony, political contemporer.

A. Latar Belakang

Kajian komunikasi politik belakangan ini semakin ramai digiatkan oleh para peminat dan ilmuwan komunikasi. Tujuannya untuk kepentingan akademik dan praktis. Kajian komunikasi politik telah menunjukkan perkembangannya yang berarti tidak saja dalam hal cakupan dan substansi isu, tetapi juga dalam perspektif dan jenis metodologi penelitiannya. Beragamnya cara pandang dan penggunaan metode penelitian dalam kajian komunikasi politik antara lain didorong oleh kontribusi beragam teori dan metode keilmuan sosial yang terkait dengan bidang komunikasi politik. Pendekatan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan metode kombinasi mewarnai perkembangan kajian komunikasi politik di berbagai perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset yang berkepentingan pragmatis.

Komunikasi politik merupakan aktivitas pendistribusian nilai-nilai dan penyampaian simbol-simbol politik. Bentuk hubungan antara komunikasi dan politik tampak pada penyajian makna bagi ide-ide politik, mendefinisikan kedudukan dan fungsi lembaga kekuasaan negara, dan mempromosikan citra kepemimpinan. Format dan substansi simbol-simbol politik tersebut juga bervariasi. Munculnya kecenderungan baru untuk melihat fenomena dan aktivitas komunikasi politik dari sudut pandang interpretif dan simbol non-bahasa menunjukkan semakin berkembangnya bidang komunikasi politik.

McQuail (1992) mendefinisikan komunikasi politik sebagai semua proses penyampaian, pertukaran, dan pencarian informasi – termasuk fakta, pendapat-pendapat, keyakinan-keyakinan dan seterusnya, yang dilakukan oleh para partisipan dalam konteks kegiatan politik yang lebih bersifat melembaga (Pawito, 2009: 2). Brian McNair (2003: 3) mengidentifikasi komunikasi politik sebagai: (1) Semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik untuk mencapai tujuan khusus. (2) Komunikasi yang ditujukan pada aktor-aktor politik oleh golongan non-politisi seperti pemilih dan kolumnis surat kabar. (3) Komunikasi tentang politisi dan aktivitasnya seperti yang terdapat di laporan beritadan editorial media massa serta bentuk-bentuk diskusi lain tentang politik.

Komunikasi politik digiatkan oleh para politisi, profesional, dan aktivis dengan menggunakan beragam simbol dan kode. Simbol dan kode tersebut diformulasi dalam konteks interaksi di antara para elit dan publik. Mereka menandai (*encoding*) kepentingan dan tuntutan politik dalam konteks budaya yang beragam dan berlapis. Agar tuntutan dan kepentingan politik dapat diartikulasikan dengan baik dan mendapat penerimaan secara tepat (*decoding*), dibutuhkan akumulasi kode yang dapat menerjemahkan makna pesan yang dimaksudkan. Praktek komunikasi politik tidak saja mengandalkan kodel formal bahasa dengan model terukur, tetapi juga dengan kode-kode kultural lainnya yang lebih cair.

Pesan-pesan politik disampaikan elit kepada publik atau sebaliknya dapat dilakukan secara langsung ataupun menggunakan media massa. Pesan-pesan politik melalui media massa, adalah pesan-pesan yang sudah dikonstruksi oleh lembaga media bersangkutan, sehingga berpotensi dimanipulasi. Pesan-pesan politik tersebut diterima oleh elit atau publik sebagai kerangka referensi pengetahuan mereka. Pada tingkat publik, pesan-pesan tersebut menjadi dasar penting bagi sosialisasi politik. Pada tingkat elit, pesan-pesan tersebut dapat dijadikan bahan baku yang penting bagi perumusan kebijakan publik. Dengan demikian, media massa dituntut untuk menyalurkan pesan-pesan politik secara substantif dalam rangka memainkan fungsinya pada mekanisme komunikasi politik. Namun, pesan-pesan politik tersebut sangat mudah dimanipulasi dan diarahkan oleh kepentingan-kepentingan di sekitar media untuk mewujudkan keinginannya.

Kecenderungan media “terlibat” secara politis dalam diskursus politik tampak tidak terang-terangan. Media menyembunyikan kepentingan praktisnya di balik kemasan yang dipahami publik sebagai informasi penting, sosialisasi, pencerahan, dorongan kesadaran, dan partisipasi publik dalam aktivisme politik, atau pendidikan politik. Berbagai metode dan kreativitas media dimaksimalkan untuk membina dan merawat relasi positif dengan para politisi di satu sisi dan publik di sisi lainnya. Hal ini dikonsentrasikan pada orientasi pemenuhan kepentingan media sebagai institusi bisnis. Manfaat yang dapat diperoleh elit dengan relasi media seperti ini bersifat pragmatis. Sementara publik justru

diarahkan pada kesadaran palsu yang semakin memosisikan entitasnya sebagai elemen yang inferior.

Peran klasik yang dimainkan media massa dalam konteks komunikasi politik terutama diorientasikan untuk memperoleh dukungan politik tertentu dan pembangkitan partisipasi politik bagi publik secara umum. Partisipasi politik merujuk pada keikutsertaan warga negara baik secara individu maupun kelompok dalam proses-proses politik secara sukarela. Keikutsertaan yang dimaksud adalah upaya mengartikulasikan kepentingan, tanggapan, saran, tuntutan dan aspirasi berkenaan dengan alokasi sumber daya publik sesuai ketentuan peraturan serta norma-norma yang berlaku dalam konteks masyarakat demokratis (Pawito, 2009: 300). Meskipun demikian, partisipasi politik publik tidak selalu menunjukkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan mereka dalam perumusan kebijakan publik. Partisipasi politik publik justru semakin tampak mekanistik, kurang melibatkan kesadaran dan pemahaman politik yang memadai. Hal ini terutama terjadi pada saat momentum aktivitas rekrutmen politik yang digerakkan secara sangat kuantitatif.

Media massa memiliki posisi sentral dalam mekanisme komunikasi politik pada masyarakat modern. Media massa menyebarluaskan informasi politik dari elit-elit politik kepada publik melalui pemberitaannya yang massif. Media massa juga dimanfaatkan oleh publik untuk menyampaikan ekspresi, kehendak, protes atau tuntutan-tuntutan kepada kekuasaan negara. Di samping itu, media massa dapat menanamkan pengaruhnya baik bagi publik, maupun bagi kelompok kekuasaan negara. Media melaporkan isu-isu publik yang dianggap penting dan terseleksi agar publik mengikuti orientasi prioritas pentingnya isu menurut media.

McNair (2003: 12) mengidentifikasi fungsi media massa dalam komunikasi politik, yakni: (1) Memberi informasi kepada masyarakat mengenai kejadian di sekitarnya. Media komunikasi berfungsi mengamati dan memonitoring peristiwa dalam masyarakat. (2) Memberi pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya fakta atau kejadian dalam masyarakat. (3) Media berfungsi sebagai wadah untuk menampung persoalan-persoalan politik sehingga menjadi wacana dalam membentuk opini publik, dan menyebarkan

kembali opini tersebut kepada masyarakat. (4) Mempublikasikan isu-isu publik kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik. Media dapat berfungsi sebagai anjing penjag (*watchdog*) dalam masyarakat. (5) Media sebagai saluran advokasi bagi kebijakan publik dan program-program lembaga politik.

Dalam komunikasi politik, media tidak saja menjadikan sarana diseminasi informasi dan citra, tetapi juga dapat memposisikan diri dalam siklus pembentukan opini publik atau isu yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan cara pandang media dalam melihat peristiwa politik sebagai realitas dalam masyarakat. Realitas politik yang dikonstruksikan media massa merupakan pembenaran atas nilai-nilai yang ada, bersifat subyektif, dan bias. Kaid (1991) mengidentifikasi tiga kategori dalam melihat realitas politik, seperti yang dikutip McNair (2003: 12-13), yakni: (1) Realitas politik obyektif, melihat peristiwa politik terjadi secara aktual apa adanya, (2) Realitas politik subyektif, memandang realitas politik seperti yang dipersepsi oleh para aktor-aktor politik dan warga negara, dan (3) Realitas politik yang dikonstruksi, melihat peristiwa politik dimaknai sebagai liputan media.

Informasi yang diterima publik dari media massa sering dimanfaatkan sebagai sumber referensi penting dan utama bagi publik dalam memahami, menginterpretasi, dan bersikap terhadap isu-isu aktual. Hal ini menandakan kuatnya potensi pengaruh yang dimiliki media massa bagi pembentukan opini publik. Interaksi di antara media, publik, dan pengambil kebijakan berlangsung dalam mekanisme komunikasi politik yang dinamis. Pengambil kebijakan dapat memanfaatkan diskursus publik mengenai isu-isu publik tertentu melalui media massa sebagai masukan bagi substansi dan proses atau mekanisme perumusan kebijakan publik agar memperoleh legitimasi publik. Media massa juga mengambil keuntungan dari diskursus publik tersebut sebagai komoditas berita yang mendatangkan keuntungan bagi institusinya. Sementara publik memiliki kesempatan yang lebih terbuka untuk mengekspresikan sikap dan kepentingan-kepentingan mereka melalui ketersediaan sarana informasi seperti media massa. Dengan demikian, media massa dianggap penting dalam proses politik sebagai

sarana menyampaikan pesan-pesan politik dari warga negara kepada para pemimpin atau elit politik.

Namun, interaksi antara publik, penguasa, dan media tidak selalu berlangsung dalam suasana yang normal dengan memperhatikan keseimbangan pemenuhan kepentingan masing-masing. Manipulasi informasi dapat dilakukan oleh penguasa untuk mengamankan dan mempertahankan *status quo* kekuasaan. Media dapat menggunakan potensinya dengan memanipulasi informasi untuk kepentingan bisnis atau politis yang diembannya. Sementara publik juga dapat memanfaatkan media massa untuk mendesakkan kepentingan-kepentingannya sendiri. Jika benturan kepentingan antara penguasa, media, dan publik tidak dapat ditoleransi secara produktif, akan menimbulkan makin meluasnya manipulasi informasi yang mengakibatkan terjadinya pembohongan publik dan berkonsekuensi bagi semuanya legitimasi publik.

Partisipasi politik dirujuk pada keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik warga akan terwujud dari kesadaran politik yang dimilikinya berkenaan dengan relasi antara kekuasaan negara dan warga negara. Partisipasi politik menunjukkan adanya dukungan rakyat terhadap keputusan publik yang dirumuskan oleh lembaga-lembaga politik formal. Partisipasi politik rakyat tidak saja diwujudkan dalam keikutsertaannya dalam mengikuti aktivitas politik penting seperti pemilu, tetapi juga dalam memberikan tuntutan dan evaluasi terhadap kebijakan publik. Komunikasi politik dalam negara demokrasi hendaknya mengupayakan partisipasi aktif warga negara dalam prosedur dan evaluasi pengambilan keputusan publik, misalnya dalam hal perumusan hukum dan kebijakan publik.

Dalam konteks komunikasi politik, partisipasi politik dimaksudkan untuk memperoleh legitimasi publik yang lebih kuat terhadap hukum atau kebijakan yang diputuskan. Partisipasi politik warga negara dapat menggunakan ruang publik politis sebagai arena melakukan praktek atau aktivitas politik, seperti melalui saluran media massa, organisasi-organisasi non-pemerintah, diskusi-diskusi publik, atau melalui gerakan mahasiswa. Partisipasi politik juga berkaitan dengan pengetahuan dan kesadaran politik yang dimiliki warga negara. Sosialisasi politik

akan mendorong partisipasi politik warga negara. Sosialisasi politik tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan media massa.

Abramson (1995) dan Hardwick, (1996) seperti yang dikutip Pawito (2009: 298-300), mengidentifikasi dua jenis partisipasi politik, yakni (1) Partisipasi politik konvensional, misalnya dalam memberikan suara dalam pemilihan umum, ikut dalam kegiatan kampanye politik, bergabung dalam kelompok kepentingan tertentu, melakukan lobi-lobi politik, dan menjadi kandidat politik tertentu. (2) Partisipasi politik tidak konvensional merujuk pada berbagai kegiatan yang cenderung melibatkan banyak orang dalam suatu bentuk kelompok massa dan terkadang disertai pelanggaran tertib hukum dan tindakan kekerasan.

B. Fenomena Aktivisme Komunikasi Politik Kontemporer

Dalam beberapa dekade terakhir, negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat mengalami kecenderungan penurunan konsumsi berita media konvensional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menurunnya kesadaran dan partisipasi politik warga beriringan dengan kecenderungan menurunnya konsumsi media berita tradisional dan isu publik. Para peneliti menyimpulkan bahwa terdapat kecenderungan warga mengalihkan konsumsi konten media ke *genre* hiburan. Robert Putnam (2000) bahkan menyimpulkan bahwa media hiburan bertindak paling baik sebagai pengalihan dari politik. Bagi Putnam, meningkatnya frekuensi dan durasi mengkonsumsi *genre* hiburan, terutama di kalangan muda, dianggap sebagai sumber utama menurunnya ‘modal sosial’ (Carpini dalam Semetko dan Scammell, 2016: 7).

Di sisi lain, konten media yang bersifat “berita” dan yang “hiburan” semakin kabur. Keduanya bisa saling melengkapi. Para produser televisi memproduksi konten yang diberi label “informasi” namun juga menyertakan unsur hiburan. Konten media yang secara substansial bersifat informasional, kerap dilengkapi dengan unsur hiburan yang awalnya hanya sebagai “pembangkit daya tarik” khalayak. Dewasa ini, unsur suplemen tersebut cenderung semakin memperoleh tempat dalam bingkai konten informasional. Begitu pula di sisi lain, konten hiburan juga memuat substansi informasi yang kehadirannya terkadang

tidak sekedar sebagai pelengkap struktur konten program. Hal ini mendorong para peneliti komunikasi massa untuk mengidentifikasi serta membandingkan kekuatan pengaruh yang ditimbulkannya bagi khalayak. Para peneliti kuantitatif tetap menempatkan tingkat pengaruh yang tidak persis sama di antara kedua sifat konten media tersebut. Bahkan beberapa peneliti memberlakukan media dan konten hiburan tidak relevan jika dikaitkan dengan pengaruh yang berdimensi politik pada warga.

Seiring dengan semakin banyaknya konten yang terkait politik dalam *genre* media hiburan, perhatian peneliti juga menunjukkan perkembangan berarti dalam studi mengenai pengaruh penggunaan media hiburan terhadap keterlibatan warga dalam pandangan, sikap, praktik politik, dan demokrasi. Perhatian media pada elit politik tidak hanya dalam hal apa yang mereka katakan tetapi juga bagaimana mereka mengatakannya, serta penggunaan simbol-simbol non-verbal lainnya. Media tidak lagi hanya disibukkan oleh program yang berusaha mengungkap tafsir atau makna dari pernyataan tokoh politik, tetapi juga di mana mengatakannya, dengan siapa, kapan, pakaian apa yang dikenakan, dan suasana seperti apa yang terjadi (konteks).

Perbincangan mengenai perilaku non-verbal para politisi cenderung dikemas secara lebih santai dan menghibur. Meskipun demikian, makna-makna sosial-politik yang dikonstruksinya tidaklah kalah penting dengan program yang lebih serius dan formal. Suasana santai dan rileks diproduksi oleh konten media yang lebih menghibur, walaupun tetap dengan muatan politis.

Meskipun sifatnya simbolik dan “ringan”, pertukaran artefak kebudayaan, seperti pakaian adat daerah oleh elit politik atau “orang terpenting” merupakan fenomena yang menarik dalam komunikasi politik. Penggunaan baju adat Bugis oleh Presiden Jokowi (etnik Jawa) dan pakaian adat Jawa oleh Wapres Muh. Jusuf Kalla (etnik Bugis) pada Sidang Tahunan MPR RI, 16 Agustus 2017, bisa dimaknai bukan hanya sebagai pertunjukkan yang disemangati oleh kemajemukan Indonesia secara kultural, tetapi juga oleh latar politis. Peristiwa tersebut dipublikasikan dan dimaknai media massa dalam berbagai program.

Pertukaran mengindikasikan beberapa hal atau kemungkinan. Salah satu di antaranya adalah sikap saling menerima dan menunjukkan keberagaman. Penggunaan pakaian adat daerah oleh presiden dan wakil presiden dalam acara resmi kenegaraan seperti Sidang Tahunan MPR RI adalah hal yang baru. Tidak ada presiden dan wakil presiden sebelumnya melakukan hal yang sama. Presiden Jokowi dan wakil Presiden Jusuf Kalla dikesankan membuat suasana baru yang berbeda dari *top elites* sebelumnya. Mereka dicitrakan oleh media sebagai pasangan pemimpin yang lebih kreatif, inovatif, dan lebih menghargai kebhinnekaan. Hal ini dapat ditafsirkan lebih lanjut bahwa ada kemajuan penting dalam hal perilaku politik untuk menjadi contoh bagi pemegang kekuasaan di jajaran yang lebih rendah. Fenomena ini juga mendorong sikap reflektif seluruh elemen bangsa untuk lebih toleran dan dapat mengamalkan Pancasila secara sungguh-sungguh.

Fenomena ini demikian menarik dan menjadiperbincangan publik, baik interaksi di dunia nyata, maupun melalui media sosial. Perbincangan hangat ini antara lain dimungkinkan juga oleh siapa aktor yang terlibat (*name make news*) dan konteks peristiwa (*political event*). Seandainya yang bertukar pakaian adat daerah adalah dua orang penduduk sipil biasa yang berasal dari etnik Jawa dan seorang etnik Bugis, tidak akan menjadi perbincangan publik apalagi viral di media sosial. Peristiwa ini menjadi bahan perbincangan menarik bisa juga karena konteksnya. Jika Presiden Jokowi menggunakan songkok Bone (pakaian adat etnik Bugis) dan Wapres Jusuf Kalla memakai blangkon (penutup kepala etnik Jawa) dalam rangka mengikuti acara biasa, misalnya menghadiri resepsi pernikahan seorang warga atau kerabat mereka, isunya juga tidak akan “seramai” saat presiden dan wapres mengikuti acara resmi kenegaraan.

Waktu dan ruang merupakan bahasa komunikasi yang mengandung pesan. Bahasa merupakan sesuatu yang paling teknis dari sistem pesan. Menurut Hall waktu dan ruang tidak hanya memengaruhi komunikasi tetapi membawa dampak yang sangat besar terhadap komunikasi (Alo Liliweri, 2016: 85). Bagi Hall, semua masyarakat mengakui kalau bahasa sebagai “cetakan pikiran manusia” di mana “pikiran” itu bisa hadir dalam bentuk perilaku maupun kata-kata yang terungkap maupun tertulis berdasarkan kebudayaan (Alo Liliweri, 2016: 86). Kebudayaan

secara universal menjadi latar atau arena di mana bahasa dipraktekkan dan dimaknai. Setiap konteks budaya atau komunitas memproduksi sistem kode dan konten yang mencerminkan jati diri dan histori yang dimilikinya. Meskidemikian, sifat penafsiran dan format kode yang digunakan bersifat dinamik dan terbuka. Elit politik dan publik bergerak dalam praktik komunikasi yang tidak saja kontekstual, tetapi juga dalam dinamika orientasi dan kepentingan personal.

Kebudayaan mengandung makna yang sangat luas dan menyentuh seluruh sendi kehidupan manusia. Kebudayaan menembus waktu di masa lampau dan meneropong tempo di masa depan. Aktivitas dan peristiwa sosial politik tidaklah terpisah dari sistem kebudayaan dan pranata sosial yang hidup dalam masyarakat. Tindakan komunikasi para politisi secara khusus, dan warga negara secara umum, tidak hanya menunjukkan ekspresi kepentingan artikulatifnya secara pribadi atau kelompok/organisasi politik formal, tetapi juga merepresentasikan warna kebudayaan yang menaunginya. Simbol kebudayaan dalam aktivisme politik sangat variatif, baik dari segi format, kepentingan, level, dan orientasi ideologisnya. Simbol-simbol tersebut dipertukarkan dan dipertunjukkan dalam performa budaya, baik di ruang privat maupun di ruang publik. Pakaian salah satunya. Pakaian merupakan penanda paling awal yang teridentifikasi melalui indera visual manusia. Di samping memproduksi kesan lebih awal, juga mendorong dan memfasilitasi tindakan komunikasi berikutnya. Pada tingkat yang lebih makro, pakaian adalah representasi kelompok yang dapat terbaca sebagai ikatan kuat dengan pendukungnya. Jika hal ini dibawa ke wilayah komunikasi politik, maknanya menjadi semakin beragam.

Dari aspek aktor sosial, saat ini Jokowi dan Jusuf Kalla adalah orang terpenting di Indonesia. Daya tariknya sangatlah besar bagi warga negara Indonesia. Dari sisi *setting* peristiwa, Sidang Tahunan MPR RI adalah format diskursus formal paling bergengsi di Indonesia. Momentum tersebut memproduksi kebijakan-kebijakan penting yang legitim dan berkaitan dengan hayat hidup warga negara. Jokowi dan Jusuf Kalla sangat memahami struktur sosial dan orientasi kultural masyarakat Indonesia secara umum. Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur dan bersifat patriarkal. Apa yang

ditunjukkan Jokowi dan Jusuf Kalla mengukuhkan stratifikasi sosial elit politik dan menjadi panutan bagi rakyat. Publik cenderung terbiasa menjadikan elit yang dipandang positif sebagai acuan dalam sikap dan tindakan mereka sebagai keharusan berbudaya dan berpolitik.

Dalam teori pertukaran sosial, pertukaran langsung dipandu oleh norma resiprositas, bahwa jika seseorang menerima sesuatu dari pihak lain, maka ia wajib untuk membalasnya, meskipun di waktu yang tidak bersamaan. Secara praktis, dalam konteks politik uang (*money politics*), jika seorang warga negara yang memiliki hak suara dalam aktivitas politik seperti pemilu atau pilkada mendapatkan bingkisan berupa materi atau uang dari kandidat politik, maka ia dituntut untuk menghormati dan mendukung kandidat tersebut. Jika tidak, maka menurut logika teori pertukaran sosial ini, sang kandidat politik tersebut diperlakukan secara tidak adil oleh individu bersangkutan. Selalu ada harga atau pengorbanan yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh. Jika pertukaran ini sukses, maka akan menghasilkan jalinan interaksi sosial yang stabil. Stabilitas inilah yang secara potensial merusak tatanan nilai sosial positif karena kecenderungannya mengubah arti penting pertukaran. Misalnya pandangan yang menempatkan pemenuhan kebutuhan personal di atas resiprositas (Littlejohn dan Foss, 2016: 1076). Terjadi proses reduksi kebersamaan, tindakan saling menghargai dan saling menghormati karena desakan kepentingan sepihak. Dari sinilah sumber kecurangan tindakan berasal. Pada praktiknya, pertukaran menjadi instrumen bagi kemenangan dalam kompetisi dalam segala cara, termasuk menjatuhkan atau mengorbankan pihak lain secara tidak *fair*.

Ekses negatif lainnya yang mungkin dimunculkan oleh sikap hanya memperhitungkan kepentingan sepihak saja dalam teori pertukaran sosial adalah toleransi pada level yang lebih besar dalam hal deviasi norma yang terjadi. Aspek-aspek moral-etis seperti norma budaya secara potensial dipandang menjadi penghambat bagi terpenuhinya kebutuhan untuk bisa bertahan dan atau potensi mengembangkan serta menggandakannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap yang lebih terbuka untuk menerima keganjilan-keganjilan etis yang menjadi rangkaian proses pertukaran tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa kepentinganlah yang

lebih utama dalam suatu interaksi sosial. Semakin tinggi level interaksi yang terjadi, menunjukkan tingginya volume dan intensitas pertukaran sosial yang dilakukan individu dalam lingkungannya. Kecenderungan ini justru diikuti oleh sikap yang lebih banyak menerima pelanggaran norma sosial.

Teori pertukaran sosial menjelaskan sifat materialisme manusia dalam hubungan sosialnya. Hubungan tersebut difasilitasi oleh simbol-simbol komunikasi, di antaranya bahasa. Bahasa menyambungkan satu gagasan dengan gagasan lainnya, menukar pandangan dengan pandangan lainnya. Bahasa memiliki kemampuan penjelasan yang tidak dimiliki oleh jenis tanda lainnya. Bahasa dapat menyederhanakan hal yang kompleks, menjelaskan yang kabur, menunjukkan orientasi tertentu, mengidentifikasi, menyimpan, dan mengekspresikan perasaan.

C. Bingkai Kebudayaan dalam Komunikasi Politik

Manusia dari berbagai kebudayaan di dunia menempuh banyak cara untuk menyatakan ide atau gagasan, identitas, pandangan dunia atau orientasi hidup, mendeskripsikan manusia, benda atau peristiwa tentang kebudayaan mereka (Liliweri, 2014: 294). Pikiran dan tindakan manusia melalui atau memakai simbol, tanda, ikon, kode, dan indeks. Menurut Palczewski (2012) dalam Liliweri, (2014: 294), simbol memfasilitasi pemahaman tentang dunia di mana manusia hidup, dia berfungsi sebagai dasar bagi manusia untuk membuat penilaian. Simbol-simbol tersebut saling melengkapi antara yang verbal dan non-verbal. Interaksi melalui pesan verbal cenderung jamak dalam masyarakat dan menunjukkan tingkat kognisi tertentu. Sementara komunikasi non-verbal lebih natural dan kontekstual. Komunikasi non-verbal dalam prakteknya bisa disengaja, bisa juga tidak disengaja.

Menurut Edward Twitchell Hall (1976) manusia hidup dalam kebudayaan. Kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari ruang dan waktu. Melalui ruang dan waktu, kebudayaan diceriterakan melalui warisan dari generasi ke generasi. Fungsi pelestarian kebudayaan dijalankan oleh aktivitas komunikasi dalam berbagai bentuk dan konteksnya. Tujuannya agar manusia dan budayanya selalu

terjalin hubungan yang harmonis. Komunikasi juga memainkan peran sebagai penyelamat kebudayaan dari keterpisahan antargenerasi. Manusia mengisi kehidupannya melalui kebudayaannya saat ini. Kebudayaan tersebut dipelajari dari generasi sebelumnya, dikembangkan, dirawat, dan diadaptasikan dengan konteks dan kebutuhan manusia. Ekspresi komunikasi manusia diwujudkan dalam bentuk kode-kode verbal dan non-verbal. Salah satu tipe komunikasi non-verbal yang sangat familiar dengan kehidupan sosial-budaya manusia adalah tampilan, di antaranya melalui pakaian (model dan warna). Pakaian tidak saja berfungsi untuk melindungi manusia dari lingkungan alam seperti cuaca, menunjukkan sisi kemanusiaan dan kesosialan, fungsi-fungsi etis-religius, tetapi juga menjadi penanda identitas pribadi dan kelompok. Dalam hal identitas kelompok, pakaian adalah penciri yang utama.

Meskipun Hall memandang komunikasi verbal dan non-verbal sama pentingnya dalam interaksi sosial, Hall justru lebih banyak mempelajari komunikasi non-verbal daripada komunikasi verbal. Komunikasi dipandang sebagai aktivitas yang dengannya kebudayaan hidup, berkembang, dan lestari. Tidak semua hal yang terjadi atau dilakukan manusia di dunia dapat diceriterakan dengan baik dan utuh melalui bahasa verbal. Dengan demikian, bahasa atau kebudayaan berpotensi menyembunyikan hal-hal yang tidak bisa diungkapkan melalui bahasa. Jika demikian, dibutuhkan format pesan komunikasi yang tidak harus berbentuk verbal, agar pemahaman manusia mengenai realitas kehidupannya lebih kompleks. Format pesan yang dimaksudkan Hall disebut "*the silent language*" (Liliweri, 2016: 84). Kehadiran bahasa senyap dalam aktivitas komunikasi manusia tidak hanya dipandang sebagai pelengkap bagi bahasa verbal, tetapi juga sebagai pengontrol perilaku komunikasi.

Pandangan Hall mengenai perlunya komunikasi non-verbal dalam interaksi manusia, seirama dengan konsepsi pendasaran teori komunikasi lainnya yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Freud bahkan dengan tegas menguraikan ketidakpercayaannya pada komunikasi melalui bahasa. Menurut Freud, bahasa sangat terbatas dalam mengekspresikan pikiran, asumsi, dan perasaan manusia. Freud menuduh kata-kata yang digunakan manusia justru menyembunyikan

banyak hal dari apa yang seharusnya diungkapkan (Alo Liliweri, 2016: 84). Freud mengibaratkan apa yang tersembunyi dalam pikiran manusia dan tidak terungkap sebagai mimpi, yang mengetahui hanya si pemimpi. Seseorang yang mendengar cerita orang lain mengenai mimpinya, hanya mengetahui dan mendengar bagian yang diceriterakannya. Aspek tertentu yang terjadi dalam mimpinya dan tidak diceriterakannya, tidak ada yang tahu, selain dirinya sendiri.

Pergumulan peran dan posisi dalam lingkungan kekuasaan secara nasional, elit politik menunjukkan perlunya membedakan diri dan kelompoknya dengan kelompok elit politik lainnya. Hal ini antara lain berkaitan dengan perbedaan identitas kultural dan faktor-faktor keetnikan. Kecenderungan identifikasi identitas memuat sejumlah kepentingan. Kepentingan tersebut tidak saja menunjukkan kontribusi bagi kelompok yang lebih besar secara nasional, tetapi juga memperlihatkan eksistensi mereka sebagai suatu kelompok budaya. Hal ini dimungkinkan sebagai simbol dari pengakuan multikultural dari pandangan atau evaluasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, khususnya yang dominan secara politis dan budaya.

Dengan representasi keetnikan seperti ini, elit politik mengingatkan perlunya “membawa” atribut-atribut atau karakter dari kelompok masyarakat yang diwakilinya. Representasi keetnikan menjadi demikian cair setelah para elit memamerkan pertukaran simbol identitas melalui media massa. Dengan demikian, tidak ada penanda yang kuat untuk merepresentasikan dominasi etnik tertentu dibandingkan dengan kelompok etnik lainnya. Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. Namun, penyebaran penduduknya tidak merata secara nasional. Kelompok etnik tertentu cenderung lebih dominan karena didukung oleh faktor-faktor demografis dan historis. Peristiwa politik bertukar pakaian daerah justru tidak mencitrakan eksklusivitas kelompok etnik tertentu.

Komunikasi politik berlangsung dalam tataran interaksi sosial. Masyarakat majemuk yang memiliki berbagai latar belakang dan kepentingan yang beragam berpotensi menimbulkan konflik sosial yang dapat mengancam integrasi sosial. Karena itu, interaksi sosial didorong untuk dapat mewujudkan kesadaran politik warga negara untuk menerima dan menghargai berbagai perbedaan-perbedaan

tersebut. Masyarakat modern dicirikan oleh sifat pluralitasnya yang rawan dengan konflik kepentingan.

Dalam konteks psikologi sosial, menurut McCall dan Simmnons, transformasi identitas sosial ini berkaitan dengan identitas peran antara struktur kebudayaan dan struktur sosial. Struktur budaya suatu masyarakat berupa pola-pola persepsi, berpikir, dan perasaan, mencakup peran yang diharapkan (*role expectations*). Struktur sosial suatu masyarakat yang merupakan pola-pola perilaku sosial mencakup tampilan peran (*role performance*). Identitas peran diletakkan di atas dan ditentukan oleh peran dalam struktur sosial dan struktur budaya (Liliweri, 2005: 41).

Pakaian tidak sekedar berfungsi untuk melindungi tubuh dari cuaca dan menutupi bagian-bagian tertentu dari badan manusia, tetapi juga menjadi penanda entitas dan identitas dalam kehidupan sosial. Pakaian, menurut Nordhot dalam Barnard (2009: ix) dapat dimetaforakan sebagai “kulit sosial dan budaya”. Pakaian memberi ciri bagi pemakainya, menandainya dari luar sebagai entitas yang berasal dari kelompok atau komunitas tertentu. Dalam praktik politik, penanda artifaktual seperti pakaian tidak saja menunjukkan identitas yang memberi kesan berbeda, tetapi juga simulasi ideologis. Ketika seorang pemimpin negara menandai dirinya dengan atribut kedaerahan, bisa dimaknai sebagai ekspresi politis sederhana, bahwa seorang pemimpin nasional sejatinya berasal dari lingkup yang lebih kecil (daerah). Pemimpin politik pada level nasional perlu menyadari bahwa kekuatan nasional sesungguhnya ditentukan oleh kekuatan daerah yang beragam, menyatu, dan oleh karenanya kuat. Pemimpin nasional dengan atribut daerah bisa juga ditafsirkan sebagai upaya elit untuk memproduksi kesan yang lebih positif dari publik bahwa di antara elit dan publik tidak berjarak. Kesan kedekatan antara warga negara dan pemimpin akan mendukung bangkitnya partisipasi publik dalam proses-proses politik dan ekonomi.

D. Penutup

Media massa dalam kepentingan demokratis demikian kontributif dalam memberi informasi, mendidik, melakukan fungsi sosial seperti advokasi, dan membangkitkan kesadaran positif warga. Menurut Pradip (2017), praktek

kekuasaan di negara-negara demokrasi sering terjebak dalam keinginan tidak tergantikan atau mempertahankan *status quo*. Hal ini tidak saja dilakukan melalui praktik dan aktivisme politik formal, tetapi juga melalui berbagai saluran lain, termasuk media budaya.

Upaya konkret dan tindakan politik yang tidak sepenuhnya disadari oleh publik dilakukan penguasa dengan maksud membentengi kekuasaannya agar tidak mudah ditembus atau direduksi oleh kekuatan lain. Melalui fasilitas legalitas dan legitimasi, kekuasaan negara kerap diwarnai dominasi dan praktik monopoli atas nama demokrasi yang justru bertentangan dengan nilai demokrasi. Konsekuensinya, kekuasaan menjadi semakin hegemonik dan rakyat tidak memiliki kekuatan memadai untuk membendunginya. Kondisi seperti ini secara ideal hendaknya direspon secara produktif oleh media sebagai institusi kontrol sosial dan artikulasi publik. Media dituntut memiliki sensitivitas menciptakan dan merawat demokrasi, khususnya dari sisi ruang publik. Media dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan hegemoni tandingan dalam menghadapi hegemoni kekuasaan yang sarat dengan kepentingan politik dan ekonomi. Namun, jika media justru berada dan memposisikan diri dalam lingkaran kekuasaan yang hegemonik, maka publik kehilangan wadah paling potensialnya dalam artikulasi kepentingan dan wadah resistensi. Dengan demikian, media ikut bertanggung jawab atas keroposnya kekuatan ruang publik karena dominasi kekuasaan yang ikut dibelanya.

Kekutan hegemonik kekuasaan tidak selalu menimbulkan perlawanan frontal dari rakyat, meskipun mereka menyadari akibat negatifnya. Publik akan masuk ke dalam jeratan kekuasaan hegemoni tersebut melalui kesadaran palsu dalam bentuk keterpaksaan menerima kenyataan. Melalui prosedur yang difasilitasi demokrasi dan legitimasi kekuasaan yang dimilikinya, sertanormabudaya yang dianggap universal dan luhur, elit kekuasaan mendorong publik untuk menerima keadaan mereka dalam kaitannya dengan relasi kekuasaan sebagai sesuatu yang bersifat alamiah dan tidak perlu dipersoalkan. Akibatnya, publik akan membentuk kesepakatan dengan kekuasaan dan ikut mendukung praktik-praktik kekuasaan yang boleh jadi tidak menguntungkan mereka. Realitas

ini dimanfaatkan oleh elit sebagai kesempatan dalam memperluas kekuasaan yang sering berlindung di balik konsep pengembangan demokrasi, memelihara kemajemukan, dan persatuan nasional.

Kelemahan publik dalam menghadapi kekuasaan tidak sepenuhnya karena publik sendiri. Kelemahan ini juga dimungkinkan oleh ketiadaan atau minimnya kontribusi media dalam pembangkitan kesadaran publik dalam relasi bernegara. Peran-peran positif media sebagai sarana sosialisasi, kontrol, dan pencerahan untuk mendukung *civil society*, malah berfungsi sebaliknya. Media justru semakin memosisikan rakyat sebagai elemen paling inferior dan tidak berdaya dalam rebutan kepentingan ekonomi politik di tingkat elit dan kelas menengah.***

Kepustakaan

- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Fahri. 2010. *Negara, Pasar, dan Rakyat: Pencarian Makna, Relevansi, dan Tujuan*, Jakarta: Faham Indonesia.
- Haryatmoko. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haryatmoko. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia.
- Ibrahim, Idi Subandy. 2007. *Budaya Populer sebagai Komunikasi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Kaid, Lynda Lee. 2015. *Handbook Penelitian Komunikasi Politik* (Terjemahan Ahmad Asnawi). Bandung: Nusamedia.
- Liliweri, Alo. 2014. *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusa Media.
- , 2016. *Konfigurasi dasar Teori-teori Komunikasi Antarbudaya*. Bandung: Nusa Media.
- Littlejohn, Stephen W. dan Karen A. Foss. 2016. *Ensiklopedia Teori Komunikasi* (Terjemahan Tri Wibowo). Jakarta: Kencana.
- McNair, Brian. 2015. *Pengantar Komunikasi Politik* (Terjemahan Imam Muttaqien). Bandung: Nusamedia.
- Mulyana, Dedy. 2013. *Komunikasi Politik, Politik Komunikasi: Membedah Visi dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik*. Bandung: Remaja RosdaKarya.
- Pawito, 2009. *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Semetko, Holli A. dan Margaret Scammell (ed). 2016. *Handbook Komunikasi Politik* (Terjemahan GOR Lamahu). Bandung: Nusamedia.
- Sen, Krishna dan David T. Hill. 2000. *Media, Budaya, dan Politik di Indonesia* (Terjemahan Sirikit Sah). Jakarta: ISAI.

Thomas, Pradip. 2017. *Media Democracy* (entri) dalam Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss: *Ensiklopedia Teori Komunikasi* (Terjemahan Tri Wibowo BS). Jakarta: Kencana.